

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi secara menyeluruh sangat dibutuhkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata baik dari materi maupun spiritual. Pembangunan yang meliputi aspek kehidupan seperti kesehatan, perekonomian, pendidikan, transportasi dan lain-lain. Dalam pembangunan juga perlu dilakukan secara merata diseluruh wilayah. Hal ini bertujuan agar tidak menyebabkan kesenjangan antara daerah satu dengan daerah lain.

Adanya kesenjangan akan menyebabkan kecemburuan antar daerah. hal ini dikarenakan daerah yang kurang maju akan merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah. Selain itu akan berdampak pada perpindahan tenaga kerja dari daerah kurang maju ke daerah maju dikarenakan kurangnya kesempatan kerja. Sedangkan di daerah maju akan menampung banyaknya jumlah penduduk sehingga tempat tersebut akan membutuhkan pengembangan dan pembangunan. Hal ini lah yang kemudian menyebabkan daerah kurang maju semakin merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah.

Upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang merata dapat dilakukan melalui desentralisasi otonomi daerah. Hal ini bertujuan agar pembangunan dapat dengan mudah dilaksanakan secara merata, potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan maksimal melalui wewenang lebih yang diberikan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

Adanya otonomi daerah memberikan tantangan bagi suatu daerah itu sendiri. Sehingga pemerintah daerah akan melakukan perencanaan yang lebih terencana sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk mengembangkan daerahnya sendiri. Perencanaan pembangunan pun harus dilakukan dengan baik. Hal yang perlu diperhatikan dalam suatu perencanaan pembangunan suatu daerah adalah potensi yang dimiliki daerah tersebut dan apa saja kebutuhan daerah tersebut. Jadi pembangunan perlu diawali dengan perencanaan yang kreatif sehingga nantinya mampu menciptakan pembangunan yang dapat berjalan dengan lebih teratur dan terarah (Tjokroamidjojo dalam Arief, 2006).

Pembangunan dan pengembangan merupakan dua hal yang erat kaitannya. Pembangunan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan dalam suatu pengadaan atau mengatur sesuatu yang belum ada. Sedangkan pengembangan merupakan suatu kegiatan yang memajukan atau memperbaiki atau meningkatkan sesuatu yang sudah ada tersebut (Jayadinata, 1999).

Pengembangan wilayah merupakan suatu usaha yang terencana untuk memajukan suatu wilayah dengan menggunakan potensi yang dimiliki wilayah tersebut baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pembangunan yang saat ini perlu diprioritaskan di suatu wilayah adalah pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk mempercepat proses pembangunan nasional maupun regional. Selain itu infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur dapat menjadi fondasi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi dengan

bertambahnya infrastruktur dan perbaikan oleh pemerintah diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi (Suratno dalam Sumadiasa, 2016).

Terciptanya infrastruktur yang memadai tentunya akan menimbulkan dampak positif yaitu dalam penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan mobilitas barang dan jasa, dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun permasalahannya, dengan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan modal sangat besar dikhawatirkan tidak memberikan dampak positif yang cukup besar pula. Hal inilah yang kemudian menyebabkan daerah terpencil luput dari perhatian pemerintah sehingga menyebabkan daerah terpencil akan semakin terbelakang.

Dalam suatu pembangunan infrastruktur juga diharapkan pembangunan tersebut dijalankan secara merata diseluruh wilayah. Sehingga perhatian terhadap desa sangat diperlukan mengingat bahwa mayoritas pedesaan masih memiliki perhatian yang minim dari pemerintah terkait dengan pembangunan infrastruktur. Jadi pembangunan infrastruktur di pedesaan perlu didasarkan pada peningkatan kesejahteraan pedesaan.

Pada umumnya suatu desa yang kurang diperhatikan biasanya memiliki kondisi infrastruktur yang masih rendah. Seperti kondisi jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, dan infrastruktur lainnya yang masih minim. Sehingga kemudian dapat menghambat jalannya perekonomian desa, dan kemudian juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya dan bahkan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Minimnya infrastruktur dapat menyebabkan banyak masyarakat yang terkurung di suatu wilayah dengan berbagai persoalan. Yang dapat ditandai

dengan adanya wabah penyakit menular, gizi buruk, buta huruf dan keterbelakangan. Jadi dilihat dari permasalahan-permasalahan baru yang akan ditimbulkan sebaiknya dalam suatu pembangunan, pembangunan infrastruktur dapat diprioritaskan terlebih dahulu.

Infrastruktur sendiri memiliki peranan yang sangat penting yang diantaranya yaitu: mampu menyediakan lapangan pekerjaan, dapat mempengaruhi iklim investasi, sangat mempengaruhi bahkan menentukan integrasi sosial-ekonomi rakyat satu daerah dengan daerah lain dan dapat membuka isolasi fisik maupun non fisik di sejumlah wilayah.

Mengacu pada peran penting dari pembangunan infrastruktur, maka permasalahan di bidang infrastruktur yang sering terjadi di desa-desa terpencil biasanya terdapat hambatan dalam infrastruktur listrik, jalan, dan kondisi air yang masih kurang memadai. Seperti halnya infrastruktur listrik yang menjadi kebutuhan utama masyarakat pedesaan. Infrastruktur listrik merupakan kebutuhan masyarakat yang dari waktu ke waktu permintaan terhadap listrik akan selalu meningkat. Dengan meningkatnya permintaan tersebut tentunya perlu adanya pengembangan terhadap pembangunan listrik. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap listrik. Selain itu adanya pembangunan infrastruktur listrik juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi dalam suatu pembangunan dari masa ke masa juga perlu memperhatikan kebutuhan listrik dikarenakan listrik merupakan salah satu kebutuhan penting masyarakat.

Pulau Madura merupakan salah satu pulau yang terdapat di Indonesia. Terdapat empat kabupaten di Pulau Madura yaitu Kabupaten Bangkalan,

Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Pulau Madura merupakan pulau yang masih dalam proses pembangunan yang dilakukan terus-menerus. Salah satu pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan di Pulau Madura adalah jembatan suramadu yang menghubungkan antara Pulau Madura dengan Pulau Jawa, tentunya hal demikian menjadi salah satu tujuan pemerintah setempat untuk kemudian dapat meningkatkan aksesibilitas antar wilayah sehingga nantinya dapat meningkatkan perekonomian Pulau Madura.

Mengingat bahwa dalam suatu pembangunan harus dapat berkelanjutan dan merata, maka untuk Pulau Madura tentunya terdapat tantangan sendiri agar wilayah tersebut tidak memiliki ketimpangan yang tinggi dibandingkan Pulau Jawa yang secara geografis letaknya berdekatan dengan Pulau Madura. Selain itu dalam lingkup Pulau Madura juga perlu adanya pemerataan antar keempat kabupaten.

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu kabupaten yang memiliki pulau-pulau kecil. Banyaknya pulau kecil yang dimiliki tentunya akan menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah Kabupaten Sumenep dalam perencanaan pembangunan daerah agar dapat terlaksana secara merata. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep dalam perencanaan wilayahnya tentunya bertujuan agar dapat memberikan manfaat terhadap masyarakatnya dan dilakukan secara merata baik itu di wilayah daratan maupun kepulauan. Perencanaan pembangunannya harus kreatif dan terarah sehingga tidak menyebabkan ketimpangan antar wilayah daratan dan kepulauan yang dimiliki Kabupaten Sumenep.

Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Upaya tersebut telah menjadi prioritas sejak tahun 2015. Hal ini sesuai dengan misi keempat Kabupaten Sumenep yaitu “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan”. Pengembangan infrastruktur listrik merupakan salah satu upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sumenep untuk mencukupi kebutuhan listrik di pulau-pulau yang belum memiliki kecukupan akan listrik. Melalui PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) diharapkan dapat membantu usaha pemerintah dalam penyediaan tenaga listrik. Jadi meskipun di kepulauan kebutuhan listrik tidak dapat dikecualikan, karena dalam kegiatan masyarakat di setiap harinya juga tentunya memerlukan tenaga listrik.

Pada umumnya wilayah kepulauan memiliki keterbatasan dibidang infrastruktur. Salah satunya adalah infrastruktur listrik. Seperti halnya Pulau Sapudi, Pulau sapudi merupakan salah satu pulau yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep. Pulau Sapudi merupakan salah satu pulau yang cenderung memiliki banyak permasalahan terutama masalah keterbatasan akan infrastruktur listrik.

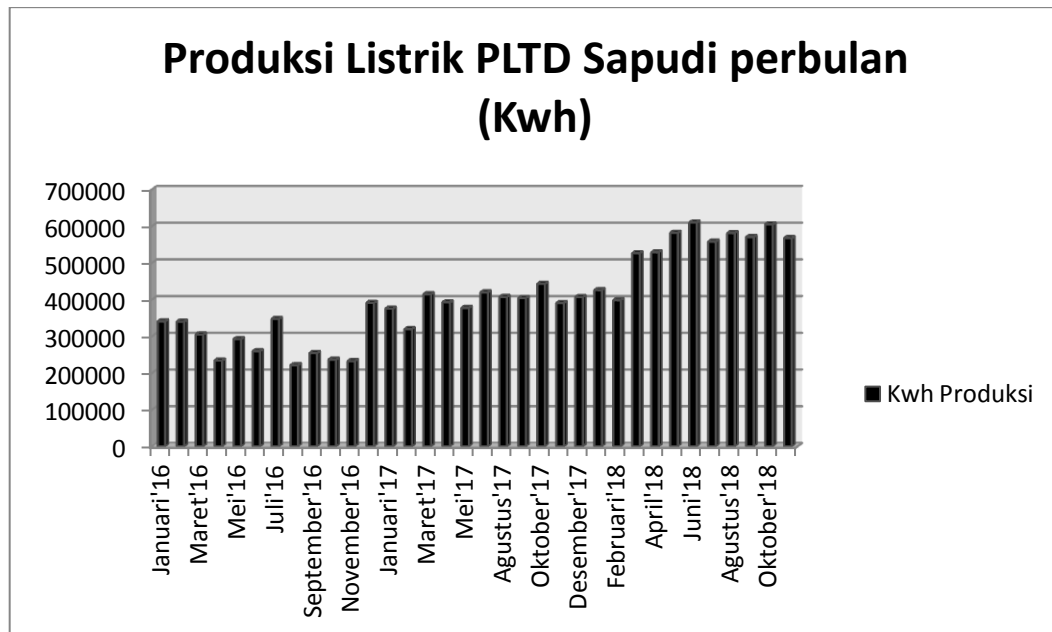
Pulau Sapudi terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Gayam dan Kecamatan Nonggunong. Terdapat 10 desa di Kecamatan Gayam dengan jumlah penduduk sebesar 31.931 jiwa, dan 8 desa di Kecamatan Nonggunong dengan jumlah penduduk sebesar 14.151 jiwa (BPS, 2017). Salah satu permasalahan yang dimiliki Pulau Sapudi yaitu dalam hal infrastruktur listrik. Listrik merupakan kebutuhan utama masyarakat kepulauan sehingga ketersediaan listrik yang memadai sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Penggunaan listrik di Pulau Sapudi ini menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Namun dengan satu PLTD yang beroperasi yaitu di Kecamatan Gayam dan PLTD tersebut masih tergolong rendah atau tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat, maka penyediaan tenaga listrik di Pulau Sapudi masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan listrik di kedua kecamatan yang dimiliki Pulau Sapudi.

Keterbatasan akan penyediaan infrastruktur listrik menyebabkan pemadaman bergilir antar desa. Sehingga cenderung terjadi keluhan pada masing-masing masyarakat karena tenaga listrik hanya beroperasi selama 12 jam, selain itu masih sering diadakan pemadaman bergilir setiap malamnya. Oleh karena itu dengan pelayanan listrik yang kurang optimal akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat kepulauan yang juga berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat yang relatif rendah.

Dengan adanya permasalahan tersebut, pemerintah setempat telah berupaya untuk melakukan perbaikan dibidang infrastruktur. Salah satunya adalah kecukupan dalam penyediaan listrik. Menurut Bapak Rozikin sebagai Penanggung Jawab PT. PLN PLTD Sapudi pada bulan Februari tahun 2018 Pulau Sapudi melakukan pengoperasian listrik selama 24 jam. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Aji selaku Penanggung Jawab PT. PLN PLTD bahwa Pulau Sapudi yang merupakan pulau terbesar kedua setelah Pulau Kangean, namun Pulau Sapudi yang lebih awal dalam melakukan pengembangan listrik dengan pengoperasian listrik selama 24 jam yaitu pada Februari 2018. Hal ini menunjukkan bahwa upaya dalam hal pengembangan infrastruktur di Pulau Sapudi telah dilakukan dengan baik. Selain itu juga terdapat partisipasi masyarakat setempat dalam peningkatan infrastruktur tersebut.

Berikut grafik terkait perkembangan kondisi infrastruktur listrik Pulau Sapudi di Kecamatan Gayam:



Gambar 1.1 Perkembangan produksi listrik (Kwh) Pulau Sapudi Tahun 2016-2018

Sumber: PT. PLN PLTD SAPUDI (Data Diolah)

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa telah terjadi pengembangan infrastruktur listrik di Kecamatan Gayam. Selama beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Hal tersebut bergantung pada penggunaan listrik rumah tangga pada setiap harinya. Dapat dilihat bahwa adanya pengembangan listrik pada tahun 2018 menyebabkan Kwh produksi listrik semakin meningkat pada tahun tersebut. Penyebab utama hal tersebut adalah dikarenakan infrastruktur listrik merupakan faktor utama yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan adanya pengembangan tersebut tentunya masyarakat terbantu dalam penggunaannya. Sehingga adanya pengembangan listrik diharapkan dapat memberikan dampak bagi masyarakat Pulau Sapudi terutama pada sisi ekonomi rumah tangga. Dampak ekonomi

tersebut dapat dilihat melalui bagaimana masyarakat dalam pemanfaatan listrik tersebut, apakah kemudian masyarakat dapat memanfaatkan peluang dari ketersediaan listrik selama 24 jam sehingga nantinya mampu meningkatkan pendapatannya atau bahkan adanya pengembangan listrik tersebut menjadi beban bagi masyarakat karena semakin meningkatnya pengeluaran terhadap listrik dan kurang baik dalam memanfaatkan peluang untuk meningkatkan pendapatan melalui ketersediaan listrik tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pengembangan infrastruktur listrik di Pulau Sapudi. Sehingga penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Dampak Ekonomi Pengembangan Infrastruktur Listrik Pulau Sapudi Studi Kasus Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan maka rumusan masalah adalah bagaimana dampak ekonomi adanya pengembangan listrik di Pulau Sapudi terhadap masyarakat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak ekonomi adanya pengembangan listrik di Pulau Sapudi terhadap masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dimasa yang akan datang, terutama dalam pengembangan infrastruktur kepulauan.

b. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata-1 jurusan Ekonomi Pembangunan serta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh berupa teori yang penulis peroleh dari perkuliahan dan diharapkan dapat memberikan tambahan pengalaman dan pengetahuan.

c. Bagi Pembaca

Sebagai pengetahuan, wawasan, bahan referensi, serta sumber informasi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang sejenis.